



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
UNIT KERJA : RSUD MUNTILAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANA ROECHANAH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 465479

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.671.058.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/54 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 131.058.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m²/94 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.540.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 441.500.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI LX 150 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOBIL, HONDA HONDA HR-V Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
6. MOTOR, VESPA PRIMAVERA IGET 150 ABS A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 44.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 79.202.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.861.639.999

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.053.399.999



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.053.399.999

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.